



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 23105-23112

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Mamluk: Analisis Kritis terhadap Konsep Moneter, Inflasi dan Intervensi Pasar

Hasmah, Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

hasma.attintour@gmail.com, mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id*

Abstrak

*Daulah Mamluk merupakan fase penting dalam evolusi pemikiran ekonomi Islam karena memperlihatkan pergeseran dari pembahasan fikih muamalah yang normatif menuju analisis ekonomi yang lebih positif, empiris, dan berorientasi makro. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mamluk dengan menelaah konsep mekanisme pasar, kebijakan moneter, inflasi, serta intervensi negara yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Maqrizi. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan historis-konseptual. Data diperoleh dari karya primer dan berbagai literatur sekunder yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik, gangguan produksi dan perdagangan, korupsi administratif, beban perpajakan, serta devaluasi akibat peredaran mata uang tembaga atau fulus secara berlebihan menjadi latar penting lahirnya pemikiran ekonomi yang progresif. Ibnu Taimiyah menjelaskan pembentukan harga melalui interaksi permintaan dan penawaran, konsep harga adil atau *thaman al-mithl*, serta legitimasi intervensi pemerintah melalui lembaga Hisbah ketika terjadi distorsi pasar. Al-Maqrizi mengembangkan klasifikasi *natural inflation* dan *human error inflation* serta menegaskan hubungan antara inflasi, kebijakan moneter, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemikiran ekonomi pada masa Daulah Mamluk memberikan dasar konseptual yang relevan bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer, terutama dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan jumlah uang beredar, memperkuat pengawasan pasar, dan mewujudkan tata kelola ekonomi yang adil serta akuntabel.*

Kata kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Daulah Mamluk, Kebijakan Moneter, Inflasi, Intervensi Pasar.

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan meningkatnya kompleksitas persoalan ekonomi berupa inflasi, volatilitas harga komoditas, gangguan rantai pasok, serta semakin besarnya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya kajian yang tidak hanya berorientasi pada instrumen ekonomi modern, tetapi juga meninjau kembali pemikiran ekonomi klasik yang memiliki landasan etika dan empiris. Dalam konteks ekonomi Islam, perhatian terhadap pemikiran para ulama klasik semakin meningkat karena dinilai mampu menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara mekanisme pasar, keadilan ekonomi, dan peran negara. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa gagasan Ibnu Taimiyah mengenai harga yang adil (*thaman al-mithl*), mekanisme pasar, dan intervensi pemerintah tetap relevan dalam menjelaskan berbagai persoalan ekonomi kontemporer, khususnya berkaitan dengan distorsi pasar, monopoli, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.[1], [2]

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, Daulah Mamluk merupakan salah satu periode yang memperlihatkan transformasi penting dalam cara para ulama memahami persoalan ekonomi. Dinasti ini berkembang ketika Mesir dan Syam menjadi pusat perdagangan internasional yang menghubungkan kawasan Asia, Afrika, dan Eropa sehingga menghadapi dinamika ekonomi yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong lahirnya pemikiran yang tidak hanya membahas aspek normatif transaksi, tetapi juga menganalisis hubungan antara kebijakan moneter, stabilitas harga, distribusi kekayaan, dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, masa Mamluk dipandang sebagai fase penting dalam evolusi pemikiran ekonomi Islam karena melahirkan analisis yang lebih empiris terhadap fenomena ekonomi yang berkembang pada masanya. Substansi historis tersebut juga menjadi fokus utama dalam proposal penelitian ini yang menempatkan kondisi sosial-ekonomi Daulah Mamluk sebagai latar munculnya pemikiran Ibnu Taimiyah dan Al-Maqrizi.[3]

Kontribusi intelektual yang paling menonjol pada masa Daulah Mamluk berasal dari Ibnu Taimiyah dan Al-Maqrizi. Ibnu Taimiyah mengembangkan analisis mengenai mekanisme pembentukan harga berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan serta menegaskan bahwa intervensi pemerintah hanya dibenarkan ketika terjadi distorsi pasar yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Al-Maqrizi menjelaskan bahwa inflasi tidak selalu disebabkan oleh faktor alamiah, tetapi dapat muncul akibat kesalahan kebijakan moneter, korupsi birokrasi, dan pencetakan uang yang berlebihan. Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kedua gagasan tersebut masih memiliki relevansi yang tinggi dalam menjelaskan fenomena inflasi, stabilitas harga, dan tata kelola kebijakan ekonomi pada negara-negara modern, sehingga kajian terhadap pemikiran ekonomi Daulah Mamluk tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer.[2]

Kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mamluk dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan perhatian, terutama terhadap kontribusi Ibnu Taimiyah dalam mekanisme pasar dan Al-Maqrizi dalam teori moneter. Penelitian-penelitian tersebut secara umum tidak lagi memosisikan kedua tokoh hanya sebagai bagian dari sejarah pemikiran Islam, tetapi sebagai sumber konseptual yang relevan untuk menjelaskan persoalan ekonomi kontemporer seperti inflasi, kegagalan pasar, ketimpangan distribusi, dan efektivitas intervensi pemerintah. Misalnya, penelitian Salsabila dan Malahayatie (2026) menunjukkan bahwa konsep *thaman al-mithl*, mekanisme pasar, dan intervensi negara yang dirumuskan Ibnu Taimiyah masih memiliki relevansi dalam menghadapi praktik monopoli, penimbunan, dan ketidakstabilan harga pada ekonomi modern. Temuan tersebut diperkuat oleh Bella dkk. (2024) yang membuktikan bahwa kebijakan intervensi pemerintah terhadap kenaikan harga pangan dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah, khususnya mengenai batas intervensi negara ketika terjadi distorsi pasar.[4]

Di sisi lain, perkembangan penelitian mengenai Al-Maqrizi lebih banyak diarahkan pada analisis teori inflasi dan kebijakan moneter Islam. Muhtadi dan Imani (2021) menjelaskan bahwa klasifikasi inflasi menjadi *natural inflation* dan *human error inflation* masih relevan sebagai landasan konseptual dalam perumusan kebijakan moneter syariah. Penelitian yang lebih mutakhir oleh Fadilah dkk. (2026) serta Al Mujaddid (2026) memperluas pembahasan tersebut dengan mengaitkan teori inflasi Al-Maqrizi terhadap fenomena kenaikan harga pangan dan dinamika inflasi Indonesia pascapandemi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penyebab inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, korupsi administratif, kebijakan fiskal, serta pengelolaan jumlah uang beredar. Temuan ini memperlihatkan bahwa analisis Al-Maqrizi memiliki dimensi kelembagaan (*institutional economics*) yang masih relevan untuk menjelaskan krisis ekonomi modern.[5]

Meskipun jumlah penelitian mengenai Ibnu Taimiyah maupun Al-Maqrizi terus meningkat, kecenderungan penelitian yang ada masih bersifat parsial. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu tokoh atau satu konsep tertentu, misalnya mekanisme pasar, harga yang adil, teori inflasi, atau kebijakan moneter, tanpa menghubungkannya dengan konteks sosial-ekonomi Daulah Mamluk sebagai lingkungan historis yang membentuk lahirnya gagasan tersebut. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan normatif-konseptual sehingga lebih menekankan relevansi pemikiran terhadap persoalan ekonomi kontemporer daripada melakukan analisis historis yang mengintegrasikan perkembangan kebijakan ekonomi, kondisi politik, dan transformasi intelektual pada masa Mamluk. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian mengenai pemikiran ekonomi Daulah Mamluk masih menyisakan ruang yang luas untuk dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif.[3], [4]

Telaah terhadap berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa perkembangan kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mamluk masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat parsial. Sebagian besar penelitian hanya memusatkan perhatian pada satu tokoh tertentu, seperti Ibnu Taimiyah atau Al-Maqrizi, tanpa menghubungkan perkembangan pemikiran keduanya dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi Daulah Mamluk sebagai suatu kesatuan historis. Penelitian mengenai Ibnu Taimiyah umumnya berfokus pada mekanisme pasar, konsep harga yang adil (*thaman al-mithl*), serta legitimasi intervensi pemerintah terhadap distorsi pasar, sedangkan penelitian mengenai Al-Maqrizi lebih diarahkan pada teori inflasi, kebijakan moneter, dan kritik terhadap praktik pencetakan uang yang berlebihan. Akibatnya, perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Daulah Mamluk masih dipahami secara terpisah sehingga belum mampu menggambarkan proses evolusi pemikiran ekonomi Islam dari perspektif mikroekonomi menuju makroekonomi secara utuh.[6]

Selain itu, kecenderungan penelitian terdahulu lebih banyak diarahkan pada upaya menunjukkan relevansi pemikiran ekonomi Islam terhadap fenomena ekonomi kontemporer dibandingkan melakukan rekonstruksi historis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya gagasan ekonomi tersebut. Padahal, pemikiran Ibnu Taimiyah maupun Al-Maqrizi tidak lahir dalam ruang intelektual yang terpisah dari realitas zamannya, melainkan

merupakan respons terhadap perubahan struktur ekonomi, dinamika perdagangan internasional, kebijakan fiskal, instabilitas moneter, serta perubahan tata kelola pemerintahan yang terjadi selama pemerintahan Daulah Mamluk. Kurangnya integrasi antara analisis historis dan analisis ekonomi menyebabkan hubungan kausal antara kondisi sosial-ekonomi Daulah Mamluk dengan perkembangan teori ekonomi Islam belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.[3], [6]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan yang lebih integratif dengan menempatkan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Al-Maqrizi dalam satu kerangka historis perkembangan ekonomi Daulah Mamluk. Penelitian ini tidak hanya menginventarisasi konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan kedua tokoh, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara dinamika sosial-ekonomi Daulah Mamluk, perubahan paradigma pemikiran ekonomi Islam, serta relevansinya terhadap persoalan moneter, inflasi, mekanisme pasar, dan intervensi pemerintah pada era kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai evolusi pemikiran ekonomi Islam klasik sekaligus memperluas khazanah kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam yang selama ini lebih banyak dikaji secara sektoral dan terfragmentasi.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dipublikasikan, masih terdapat kesenjangan konseptual dan kontekstual dalam kajian pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mamluk. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan Ibnu Taimiyah dan Al-Maqrizi sebagai objek kajian yang berdiri sendiri sehingga hubungan antara dinamika sosial-ekonomi Daulah Mamluk dengan perkembangan pemikiran ekonomi Islam belum dijelaskan secara komprehensif. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih diarahkan pada pembuktian relevansi konsep-konsep ekonomi klasik terhadap persoalan ekonomi kontemporer tanpa menjelaskan proses historis yang membentuk lahirnya konsep tersebut. Kondisi ini menyebabkan evolusi pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mamluk masih dipahami secara fragmentaris dan belum memperlihatkan keterkaitan antara perubahan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintahan, serta transformasi paradigma pemikiran ekonomi Islam secara menyeluruh.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah melalui analisis yang mengintegrasikan perkembangan kondisi sosial-ekonomi Daulah Mamluk dengan evolusi pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Maqrizi. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara perubahan struktur ekonomi, kebijakan moneter, mekanisme pasar, inflasi, dan intervensi pemerintah sebagai faktor yang membentuk perkembangan teori ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai relevansi pemikiran ekonomi klasik sebagai landasan konseptual dalam merespons tantangan stabilitas moneter, pengawasan pasar, dan tata kelola ekonomi syariah pada era kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mamluk melalui kajian kritis terhadap konsep mekanisme pasar, kebijakan moneter, inflasi, dan intervensi pemerintah yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Maqrizi. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara dinamika sosial-ekonomi Daulah Mamluk dengan lahirnya kedua pemikiran tersebut serta menganalisis relevansinya terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur sejarah pemikiran ekonomi Islam sekaligus menjadi referensi akademik bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang berorientasi pada stabilitas pasar, keadilan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan secara kritis terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mamluk melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan konseptual untuk menelusuri hubungan antara kondisi sosial-ekonomi Daulah Mamluk dengan lahirnya pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Al-Maqrizi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan gagasan kedua tokoh, tetapi juga menganalisis konteks historis yang melatarbelakangi munculnya konsep-konsep mengenai mekanisme pasar, kebijakan moneter, inflasi, dan intervensi pemerintah.[7]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya asli yang memuat pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Al-Maqrizi, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pasar, kebijakan moneter, inflasi, dan hisbah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, prosiding, dan publikasi ilmiah lain yang membahas sejarah ekonomi Islam, perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Daulah Mamluk, serta kajian kontemporer mengenai relevansi pemikiran kedua tokoh

tersebut. Seluruh literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Literatur yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, tingkat otoritas penulis, dan kualitas publikasi. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran pustaka pada buku akademik, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta dokumen ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian sehingga data yang diperoleh memiliki validitas akademik yang memadai.[8]

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan analisis deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, berbagai literatur diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang meliputi kondisi sosial-ekonomi Daulah Mamluk, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, pemikiran ekonomi Al-Maqrizi, serta relevansinya terhadap ekonomi syariah kontemporer. Hasil pengelompokan tersebut kemudian dianalisis secara kritis untuk menemukan hubungan konseptual antara dinamika sejarah Daulah Mamluk dengan perkembangan pemikiran ekonomi Islam sehingga diperoleh interpretasi yang komprehensif terhadap objek penelitian.[9]

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Kondisi Sosial Ekonomi Daulah Mamluk sebagai Latar Lahirnya Pemikiran Ekonomi

Pada masa pemerintahan Daulah Mamluk, khususnya selama periode Mamluk Sirkasia (Burji), stabilitas politik negara sering kali terganggu oleh pergolakan internal, perebutan kekuasaan antarkelompok Mamluk, pemberontakan kaum Beduin, serta lemahnya administrasi pemerintahan. Ketidakstabilan politik ini berimbas langsung pada sektor ekonomi yang diperparah oleh faktor alamiah berupa siklus pasang-surut Sungai Nil yang tidak teratur, sehingga memicu kekeringan, gagal panen, kelaparan, kemerosotan demografis akibat wabah pes (*black death*), serta praktik kecurangan seperti penimbunan barang (*ikhtikar*) dan korupsi berupa suap-menyuap dalam penunjukan jabatan. Kondisi krisis ekonomi dan inflasi kronis yang tidak kunjung mendapat solusi permanen dari penguasa inilah yang kemudian mendorong lahirnya pemikiran reformis dari para birokrat sekaligus sejarawan seperti Al-Maqrizi (melalui kitab *Ighathah al-Ummah*) dan Al-Asadi (melalui kitab *al-Taysir*) yang melanjutkan metode historis-analitis Ibnu Khaldun untuk mengkritik kebijakan penguasa serta menawarkan reformasi struktural. Dalam aspek sistem moneter, periode ini ditandai dengan kekacauan akibat kelangkaan perak yang menyebabkan peredaran mata uang tembaga (*fulus*) melonjak drastis hingga luks tak terkendali. Nilai *fulus* yang fluktuatif menggantikan dominasi dinar emas dan dirhem perak dalam transaksi harian dan pembayaran pajak iktā, yang menurut analisis Al-Maqrizi menjadi akar runtuhnya daya beli masyarakat dan pemicu utama hiperinflasi komoditas pokok seperti gandum dan roti di pasar Mamluk.[10]

Peninjauan terhadap aspek historis makro menunjukkan bahwa Daulah Mamluk berlatar belakang dari sistem perbudakan militer abad ke-13, di mana para pemimpinnya merupakan budak yang dibeli oleh sultan-sultan Ayyubiyah lalu dilatih secara intensif menjadi tentara elite hingga akhirnya berhasil merebut kekuasaan pada tahun 1250 M. Kejayaan dinasti ini sangat ditopang oleh perkembangan ekonomi yang pesat, khususnya melalui sektor perdagangan internasional yang memanfaatkan letak geografis strategis Mesir sebagai penghubung global antara Eropa, Afrika, dan Asia. Pelabuhan Alexandria menjadi pusat ekspor-impor komoditas mewah seperti rempah-rempah, sutra, dan emas, sementara pemerintah memperoleh pendapatan signifikan dari penarikan pajak terhadap para pedagang asing yang melintasi wilayah mereka. Di samping perdagangan, sektor pertanian juga menjadi pilar krusial yang dikelola secara efisien melalui pemanfaatan irigasi canggih guna menjamin kecukupan pangan rakyat sekaligus mendukung perdagangan hasil bumi. Kemajuan pada sektor perpajakan, pertanian, dan niaga inilah yang menjadi fondasi utama bagi perkembangan ekonomi Daulah Mamluk dalam menciptakan stabilitas wilayah, mendorong urbanisasi, melarang riba, serta mendanai berbagai institusi ilmiah, sosial, maupun keagamaan melalui sistem properti wakaf yang berkembang pesat.[11]

3.2. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

Dinamika operasional pasar Daulah Mamluk dapat dipahami lebih mendalam melalui teori interaksi penawaran dan permintaan (*supply-demand*) yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau menegaskan bahwa naiknya harga suatu barang tidak selalu diakibatkan oleh tindakan sewenang-wenang atau kezaliman dari pihak tertentu, melainkan merupakan hukum alam pasar yang digerakkan oleh kekuatan objektif *supply* dan *demand*. Keseimbangan dari interaksi murni kedua gaya pasar bebas inilah yang melahirkan konsep "harga alami" atau harga yang adil

(*keseimbangan mekanisme pasar*), di mana tingkat harga terbentuk secara jujur berdasarkan kelangkaan atau kelimpahan stok komoditas serta intensitas kebutuhan riil masyarakat konsumen di lapangan. Namun, pemikiran Ibnu Taimiyah juga tidak menyangkal bahwa proses pembentukan harga alami tersebut kerap kali mengalami "distorsi pasar" akibat perilaku tidak adil dari agen-agen ekonomi tertentu. Distorsi ini terjadi secara masif pada paruh kedua kekuasaan Mamluk melalui praktik inefisiensi produksi, manipulasi pasokan, tekanan sepihak pemerintah, serta monopoli (ikhtikar) oleh pihak tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja menahan peredaran barang untuk menindas masyarakat kecil demi meraup keuntungan fungsional secara tidak sah.[12]

Sebagai kelanjutan atas prinsip operasional pasar tersebut, pemikiran ekonomi Islam pada masa ini menawarkan solusi penataan melalui Konsep Harga yang Adil atau *Thaman al-Mithl*, serta instrumen Intervensi Pemerintah dan *Hisbah*. Ibnu Taimiyah merumuskan *Thaman al-Mithl* sebagai nilai harga setara atau normal yang umumnya berlaku di masyarakat pada transaksi timbal balik yang sejenis, di mana baik pihak penjual maupun pembeli sama-sama merasakan keadilan tanpa adanya unsur eksploitasi maupun kerugian sepihak. Agar keadilan harga ini dapat ditegakkan di tengah ancaman distorsi, pemerintah diizinkan melakukan intervensi pasar yang adil dan sah, seperti menetapkan regulasi harga pokok saat masyarakat sangat membutuhkannya dan mengendalikan perilaku para pedagang agar berjualan secara jujur. Pelaksanaan pengawasan pasar ini secara institusional dijalankan melalui lembaga *Hisbah* yang dipimpin oleh seorang *Muhtasib*, yang bertugas mengawasi kelancaran mekanisme pasar tradisional, mendeteksi kecurangan takaran, mencegah manipulasi pasokan, serta menindak tegas praktik monopoli demi kemaslahatan publik dan tegaknya moralitas ekonomi syariah.[4], [12]

3.3. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

Teori inflasi yang digagas oleh Al-Maqrizi mengklasifikasikan fenomena kenaikan harga secara umum dan terus-menerus ini ke dalam dua kategori utama berdasarkan faktor penyebabnya, yakni *natural inflation* (inflasi alamiah) dan *human error inflation* (inflasi karena kesalahan manusia). *Natural inflation* dipicu oleh faktor alamiah yang tidak dapat dihindari manusia, seperti bencana alam atau kegagalan hujan yang menyebabkan gagal panen, kelangkaan pasokan barang, dan lonjakan harga karena tingginya permintaan masyarakat. Sementara itu, *human error inflation* sepenuhnya bersumber dari kesalahan kebijakan penguasa, yang diidentifikasi oleh Al-Maqrizi ke dalam tiga penyebab utama, yaitu praktik korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk (seperti suap jabatan), penerapan sistem perpajakan yang berlebihan dan menindas rakyat, serta peningkatan sirkulasi mata uang tembaga (*fulus*) secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran akibat perilaku boros para pejabat.[13] Analisis historis ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan stabilitas ekonomi makro di Indonesia masa kini, khususnya dalam hal merumuskan kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga daya beli. Relevansi tersebut terlihat jelas pada pentingnya intervensi pemerintah Indonesia dalam memitigasi *natural inflation* melalui pengamanan jalur distribusi pangan saat cuaca buruk agar tidak memicu kelangkaan sementara, sekaligus menjadi pengingat strategis bagi Bank Indonesia dan pemerintah pusat untuk menekan risiko *human error inflation* dengan menjaga tata kelola anggaran yang transparan, menetapkan tarif pajak yang proporsional agar tidak menurunkan produktivitas dunia usaha, serta secara konsisten mengendalikan jumlah peredaran uang di masyarakat guna mencegah terjadinya penurunan nilai riil mata uang rupiah.

Melengkapi seluruh rangkaian analisis struktural ekonomi tersebut, kerangka teoritis moneter Islam secara mendasar memandang uang murni sebagai alat tukar publik (*goods public*) dan alat ukur nilai barang, alih-alih sebagai komoditas modal (*capital*) yang dapat ditimbun atau diperdagangkan secara spekulatif. Atas dasar filosofi ini, kebijakan moneter Islam menetapkan larangan mutlak terhadap sistem bunga (*riba*) karena dinilai membentuk sekat spekulatif yang memisahkan sektor keuangan dengan sektor riil. Sebagai gantinya, otoritas moneter diarahkan untuk mengatur likuiditas dan mempercepat perputaran uang melalui mekanisme bagi hasil (*sharia compliance*) guna memastikan aliran dana sepenuhnya terserap untuk membiayai pengadaan barang dan jasa produktif yang riil bagi kemaslahatan masyarakat.[13] Di Indonesia, implementasi kebijakan moneter Islam ini diterapkan secara terintegrasi oleh Bank Indonesia melalui pendekatan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Tanpa bergantung pada instrumen suku bunga konvensional, Bank Indonesia secara konsisten mengendalikan likuiditas perbankan syariah dan menjaga stabilitas harga (inflasi) menggunakan instrumen moneter syariah khusus, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), instrumen berbasis akad mudharabah/jual beli aset, serta pengelolaan likuiditas melalui transaksi Repo Syariah dan instrumen Sukuk Negara.

Krisis ekonomi yang melanda Daulah Mamluk, khususnya pada periode Mamluk Burji, merupakan akumulasi dari malapetaka moneter parah dan penurunan daya beli riil yang secara masif dikritik oleh Al-Maqrizi. Faktor utama krisis ini dipicu oleh devaluasi mata uang akibat ambisi pemerintah yang tidak terkendali dalam mencetak mata uang tembaga (*fulus*) secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran akibat perilaku buruk para pejabat korup. Sirkulasi *fulus* yang berlebihan di pasar secara alami menurunkan estimasi daya beli uang itu sendiri,

sehingga berimplikasi pada kelangkaan uang perak (*dirham*) yang dilebur oleh masyarakat menjadi perhiasan dan menyapakan mata uang berkualitas baik dari peredaran. Menghadapi kehancuran sistemik ini, Al-Maqrizi mengajukan solusi radikal berupa reformasi moneter untuk mengembalikan Mesir pada sistem moneter alami yang berdasarkan syariat Islam. Dalam rekomendasinya, pemerintah diwajibkan menghentikan ekspansi moneter *fulus* dan menetapkan secara terbatas hanya untuk transaksi bernilai kecil, serta mengembalikan fungsi emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) sebagai mata uang pokok yang menjadi standar nilai guna memulihkan kestabilan harga serta kesejahteraan masyarakat.[14]

Relevansi pemikiran konsep uang menurut Al-Maqrizi memberikan fondasi teoretis yang sangat kuat bagi analisis makro ekonomi kontemporer, terutama dalam memahami ontologi uang dan kompetisi mata uang yang terjadi dalam sistem keuangan syariah modern. Secara ontologis, Al-Maqrizi menegaskan bahwa hakikat uang alami yang riil haruslah memiliki nilai instrik yang kuat dan stabil serta berfungsi sebagai standar nilai yang jujur, sehingga pencetakan mata uang berkualitas rendah secara serampangan hanya akan mendegradasi daya beli masyarakat. Fenomena hilangnya mata uang perak akibat dominasi mata uang tembaga (*fulus*) yang berlebih dalam sejarah Mamluk mencerminkan terjadinya kompetisi mata uang di pasar moneter, di mana penciptaan mata uang buruk (*bad money*) cenderung menyapakan mata uang berkualitas baik (*good money*) dari peredaran. Dalam konteks sistem keuangan syariah modern, relevansi gagasan ini diimplementasikan melalui penekanan pada aspek *sharia compliance* (kepatuhan syariah) yang menolak segala bentuk rekayasa nilai mata uang spekulatif dan inflasi yang didorong oleh *human error*. Pemikiran Al-Maqrizi menjadi basis bagi institusi keuangan syariah masa kini untuk mendorong penguatan regulasi moneter yang prudent, mempromosikan instrumen investasi berbasis sektor riil, serta mendukung kehati-hatian dalam manajemen pasokan uang agar kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat tercapai secara berkelanjutan.[15]

3.4. Analisis Kritis terhadap Pemikiran Ekonomi Daulah Mamluk

Analisis kritis terhadap pemikiran ekonomi pada masa Daulah Mamluk menunjukkan adanya pergeseran epistemologis yang signifikan dalam dinamika pemikiran ekonomi Islam, yang menandai evolusi besar dari pendekatan fikih muamalah normatif menuju analisis ekonomi positif-deskriptif. Pada fase-fase awal sejarah Islam, pembahasan ekonomi umumnya terbatas pada koridor hukum syariah mengenai kehalalan transaksi, pelarangan riba secara tekstual, dan batasan-batasan legalistik formal. Namun, tantangan krisis hebat yang melanda Daulah Mamluk memaksa para pemikir seperti Al-Maqrizi dan Al-Asadi untuk keluar dari batasan normatif tersebut. Melalui karya monumental seperti *Ighathah al-Ummah*, Al-Maqrizi tidak lagi sekadar mengharamkan penyimpangan moneter secara hukum fikih, melainkan secara jeli memotret, merekam fakta sejarah (*flash back*), dan menganalisis hubungan sebab-akibat riil (*positif*) antara kebijakan moneter penguasa dengan hancurnya daya beli masyarakat konsumen di pasar. Perubahan paradigma ini memberikan fondasi baru bahwa fenomena sosial-ekonomi harus dibedah menggunakan pendekatan empiris dan retrospektif yang rasional demi menyelamatkan stabilitas tata kelola pemerintahan.

Di samping pergeseran metodologis tersebut, pemikiran ekonomi masa Mamluk juga mencerminkan evolusi yang sangat maju dalam skala analisis, bergerak dari pendekatan ekonomi mikro menuju perumusan ekonomi makro. Awalnya, pemikiran tokoh seperti Ibnu Taimiyah sangat berfokus pada ranah mikro, seperti mekanisme interaksi penawaran dan permintaan (*supply-demand*), pembentukan harga alami di pasar tradisional, tindakan individu dalam penimbunan barang (*ikhthikar*), serta konsep keadilan harga (*Thaman al-Mithl*) bagi penjual dan pembeli. Namun, ketika krisis moneter dan inflasi meluas di era Mamluk Burji, fokus analisis mereka melompat ke ranah makro ekonomi yang jauh lebih kompleks. Al-Maqrizi dan Al-Asadi mulai menganalisis variabel-variabel makro seperti kebijakan fiskal negara (surplus-defisit anggaran), beban agregat perpajakan yang menindas sektor produktif pertanian secara nasional, serta teori moneter makro mengenai jumlah uang beredar (*sirkulasi fulus*) yang menginduksi kompetisi mata uang buruk (*bad money*) terhadap mata uang baik (*good money*). Ketajaman dalam mengorelasikan kebijakan fiskal-moneter negara dengan tingkat hiperinflasi nasional ini membuktikan bahwa pemikir era Mamluk telah melahirkan basis teori ekonomi makro jauh sebelum para ekonom Barat merumuskannya.

Secara kritis, seluruh warisan pemikiran ekonomi Daulah Mamluk ini memberikan kontribusi yang sangat substantif bagi perumusan kebijakan moneter dan tata kelola ekonomi syariah kontemporer, termasuk dalam konteks implementasinya di Indonesia. Teori inflasi Al-Maqrizi yang memisahkan antara *natural inflation* dan *human error inflation* memberikan panduan bagi otoritas moneter modern bahwa penanganan inflasi tidak bisa hanya menggunakan satu instrumen moneter searah seperti pandangan kaum Monetaris Barat, melainkan harus menyentuh perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*), pemberantasan korupsi, serta penerapan tarif pajak fiskal yang adil agar tidak membunuh produktivitas sektor riil. Selain itu, konsep kebebasan pasar yang terkendali melalui fungsi pengawasan pasar (*Hisbah*) oleh seorang muhtasib memberikan justifikasi kuat bagi

pembentukan lembaga pengawas persaingan usaha modern guna mencegah monopoli dan kartel yang merusak kesejahteraan publik. Kontribusi moneter Islam era Mamluk ini melandasi sistem keuangan syariah modern seperti yang diterapkan terintegrasi dalam *dual banking system* di Indonesia untuk tetap menjaga esensi uang murni sebagai alat tukar publik tanpa bunga spekulatif, mempromosikan instrumen moneter syariah berbasis aset riil (sukuk dan SBIS), serta mengedepankan kehati-hatian (*prudent*) moneter demi terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan stabil jangka panjang.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa dinamika sosial-ekonomi Daulah Mamluk merupakan stimulus historis utama yang mendorong evolusi pemikiran ekonomi Islam dari fikih muamalah yang bersifat normatif-legalistik menuju analisis ekonomi positif-deskriptif, sekaligus memperluas ruang lingkup analisis dari pendekatan mikroekonomi menuju perumusan makroekonomi secara komprehensif. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa konsep harga alami dan interaksi *supply-demand* dari Ibnu Taimiyah, yang berlanjut pada formulasi *natural* dan *human error inflation* oleh Al-Maqrizi, lahir sebagai respons kritis empiris terhadap distorsi pasar, praktik korupsi, penimbunan (*ikhtikar*), serta devaluasi moneter akibat pencetakan uang tembaga (*fulus*) secara berlebihan oleh otoritas Mamluk Burji. Kemungkinan aplikasi dari temuan penelitian ini adalah pemanfaatan klasifikasi inflasi kelembagaan Al-Maqrizi sebagai alat analisis makro bagi bank sentral dalam memetakan risiko inflasi non-moneter yang digerakkan oleh faktor tata kelola pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini mempertegas bahwa penanganan stabilitas harga dan persaingan usaha tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan moneter searah ala monetaris konvensional, melainkan membutuhkan integrasi aspek fiskal yang adil, efisiensi rantai pasok, pemberantasan korupsi administratif, serta fungsi pengawasan pasar yang ketat seperti filosofi lembaga Hisbah. Spekulasi ilmiah yang muncul mengindikasikan bahwa tanpa adanya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih (*good governance*), instrumen keuangan syariah modern secanggih apa pun akan tetap gagal membendung laju devaluasi nilai riil mata uang apabila terjebak dalam perangkap inflasi akibat kesalahan manusia (*human error*). Sebagai saran untuk penelitian lebih lanjut, para peneliti masa depan diharapkan dapat memperluas cakupan rekonstruksi historis ini dengan metode kuantitatif atau ekonometrika sejarah (*cliometrics*) guna menguji secara terukur tingkat korelasi antara volume pencetakan *fulus* terhadap indeks harga gandum pada masa Daulah Mamluk, sehingga validitas kuantitatif dari teori moneter Islam klasik dapat diperbandingkan secara presisi dengan mazhab ekonomi modern.

Referensi

- [1] "Relevance of Ibn Taimiyah's Economic Thought on Fair Prices, Markets, and State Intervention from The Perspective of Islamic Economics | Journal of Indonesian Islamic Studies." Diakses: 14 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jiis/article/view/10556>
- [2] A. M. E. Bella, L. Rahmawati, dan M. R. Jim, "Market Intervention Policy in The Case of Rising Rice Prices in Indonesia From The Perspective of Ibn Taimiyah," *J. Islam. Econ. Laws*, vol. 7, no. 01, hlm. 36–55, Feb 2024, doi: 10.23917/jisel.v7i01.3484.
- [3] M. I. Fadilah, E. S. Milah, S. N. Ihsan, L. Marlina, dan A. F. Diyana, "Pemikiran Al-Maqrizi tentang Inflasi dan Relevansinya terhadap Fenomena Kenaikan Harga Pangan di Indonesia," *Econ. J. Ilmu Ekon.*, vol. 8, no. 1, hlm. 27–37, Mei 2026, doi: 10.30742/economie.v8i1.5300.
- [4] S. Salsabila dan M. Malahayatie, "Relevance of Ibn Taimiyah's Economic Thought on Fair Prices, Markets, and State Intervention from The Perspective of Islamic Economics," *J. Indones. Islam. Stud.*, vol. 5, no. 2, hlm. 354–362, Mei 2026, doi: 10.24256/jiis.v5i2.10556.
- [5] "(PDF) Al-Magrizi Inflation Theory of Islamic Monetary Policy Implementation in Indonesia." Diakses: 14 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/348353500_Al-Magrizi_Inflation_Theory_of_Islamic_Monetary_Policy_Implementation_in_Indonesia
- [6] R. Muhtadi dan S. Imani, "Al-Magrizi Inflation Theory Of Islamic Monetary Policy Implementation In Indonesia," *Int. J. Islam. Econ.*, vol. 2, no. 02, hlm. 150–160, 2020, doi: 10.32332/ijie.v2i2.2097.
- [7] "Metode Penelitian Sugiyono 2023 | PDF," Scribd. Diakses: 14 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://id.scribd.com/document/868601086/Sugiyono-2023-Penelusuran-Google>
- [8] S. Lewis, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches," *Health Promot. Pract.*, vol. 16, no. 4, hlm. 473–475, Jul 2015, doi: 10.1177/1524839915580941.
- [9] "Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif / Sugiyono | Perpustakaan Polbangtan Yogyakarta - Magelang." Diakses: 13 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://kikp-pertanian.id/polbangtanyoma/opac/detail-opac?id=27010&utm_source=chatgpt.com
- [10] A. Ağır, "El-Makrizi'nin İlgâse ve El-Esedi'nin et-Teysir'ine Göre Memlûklarda Ekonomik Kriz ve Enflasyon," *Türkiyat Mecm. J. Turkology*, vol. 31, no. 2, hlm. 491–531, Nov 2021, doi: 10.26650/iuturkiyat.955893.
- [11] S. M. Mardiah, S. Wahyuningsih, dan I. Parakkasi, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Mamluk".
- [12] R. Awalia, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah," *Al Iqtishod J. Pemikir. Dan Penelit. Ekon. Islam*, vol. 10, no. 1, hlm. 63–78, Jan 2022, doi: 10.37812/alqitishod.v10i1.308.
- [13] "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL MAQRIZI | Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam." Diakses: 14 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/1601>
- [14] A. T. G. N. Azizah dan A. Abdulahanaa, "Eksplorasi Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi terhadap Konsep Uang dan Inflasi," *ADILLA J. Ilm. Ekon. Syariah*, vol. 7, no. 2, hlm. 20–38, Jul 2024, doi: 10.52166/adilla.v7i2.6287.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12297>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- [15] "Money as a Mirror: Classical Islamic Monetary Ontology and the Foundations of Interest-Free Pricing by Shehzad Ahmed, Rafiqul Bhuyan :: SSRN." Diakses: 14 Juli 2026. [Daring]. Tersedia pada: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6906422&utm_source=chatgpt.com